

MASIH LAIKKAH TAPAK KANTOR KECAMATAN SRUMBUNG?

Arnis Rochma Harani^{1*)}, Eddy Indarto¹⁾, M.Najieb Sholih²⁾

*) Corresponding author email : arnisrochma@arsitektur.undip.ac.id

1)Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang - Indonesia

2) CV. Realine Design Lab, Semarang -Indonesia

Abstract

Article info

MODUL vol 19 no 1, issues period 2019

Doi : 10.14710/mdl.19.1.2019.19-24

Received : 8th may 2019

Revised : 14th may 2019

Accepted : 16th may 2019

Perkembangan model penataan kawasan di Indonesia membuat kantor kecamatan sekarang harus mampu memwadahi kegiatan formal dan informal masyarakatnya. Perkembangan sekarang, kebutuhan ruangan untuk kecamatan semakin meningkat, bangunan saat ini hanya mampu menampung kegiatan-kegiatan bagi staffnya dan ruang yang sudah ada, tetapi belum dapat menampung masyarakat saat terjadi bencana. Berbagai masalah yang timbul di lokasi memerlukan suatu studi untuk mengetahui kecamatan untuk dapat dikembangkan. Studi berlangsung dengan paradigma kuantitatif dengan pendekatan deduktif melalui analisis pustaka, studi observasi lapangan dan studi kasus kecamatan. Tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan kelayakan tapak yang sedang digunakan sebagai kantor kecamatan. Hasil dari studi ini menemukan bahwa tapak eksisting masih layak untuk dikembangkan.

Keywords: studi evaluasi; analisa tapak; kantor kecamatan; kelayakan

PENDAHULUAN

Perkembangan model penataan kawasan di Indonesia membuat kantor kecamatan sekarang harus mampu memwadahi kegiatan formal dan informal masyarakatnya. Kantor kecamatan dituntut mampu mengoptimalkan luasan yang dimilikinya untuk berkumpul, melakukan aktivitas masyarakat serta menjadi sebuah pusat pemerintahan skala kecamatan yang tanggap saat terjadi bencana khususnya dapat menampung masyarakat dengan cukup ruang (Sudibyakto,1985).

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Pasal 5 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara klasifikasi bangunan, kantor kecamatan termasuk klasifikasi bangunan gedung negara sederhana.

Saat ini kondisi kantor kecamatan Srumbung berada di jalanan yang memiliki kontur cukup ekstrim, yaitu akses pintu masuk kecamatan berada di jalan tanjakan, sehingga membahayakan dari segi pencapaian, mengingat bangunan kecamatan merupakan bangunan pelayanan publik yang harus memperhatikan faktor tersebut. Perkembangan sekarang, kebutuhan ruangan untuk kecamatan semakin meningkat, bangunan saat ini hanya mampu menampung kegiatan-kegiatan bagi staffnya dan ruang yang sudah ada, tetapi belum dapat menampung masyarakat saat terjadi bencana. Pembagian ruang pelayanan kecamatan dikeluhkan belum optimal oleh masyarakat dan penggunanya. Hal tersebut diakibatkan oleh pembagian ruang privat dan publik belum terlihat jelas sehingga sering membingungkan alur masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Dari berbagai permasalahan yang ada di lokasi, maka dibutuhkan suatu studi untuk mengetahui kecamatan untuk dapat dikembangkan, baik itu di relokasi atau dikembangkan kembali dengan tapak yang sama. Studi ini membahas mengenai kelebihan dan kekurangan serta pembobotan tapak yang akan digunakan sebagai penentu pengambilan keputusan dalam mengembangkan kantor kecamatan. Studi dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif. Kajian regulasi dan pustaka terkait pemilihan lokasi menjadi acuan evaluasi kelayakan. Selanjutnya studi observasi lapangan dengan acuan evaluasi dilakukan untuk mengkonfirmasi kelayakan tapak eksisting. Tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan kelayakan tapak yang sedang digunakan sebagai kantor kecamatan.

METODE

Studi ini menggunakan paradigma kuantitatif dengan pendekatan deduktif. Studi ini termasuk bagian dari penelitian universal desain yang berkaitan dengan prinsip adaptabilitas tanpa mengesampingkan prinsip

aksesibilitas, suportif dan keamanan (Aslaksen, 1997). Studi tentang desain dapat dilakukan dengan : evaluasi dari peraturan yang berlaku, dan pendalaman terhadap studi yang sudah ada (Harsritanto, 2018).. Studi ini termasuk pada evaluasi dari peraturan yang berlaku. Studi literatur, observasi tapak dan studi kasus yang cocok untuk mengevaluasi suatu keadaan digunakan untuk mendukung penelitian ini (Harsritanto et al, 2017 dan Dumanski, 1997). Studi literatur tentang regulasi dan pustaka terkait analisa tapak menjadi acuan dalam pendalaman kerangka evaluasi untuk diujikan pada objek studi. Observasi tapak digunakan untuk mendapatkan nilai kelayakan tapak berdasarkan rumusan parameter dari studi literatur sebelumnya. Studi kasus digunakan untuk memaknai luaran dari evaluasi observasi tapak eksisting (Harsritanto, 2018).

Waktu penelitian ini dilakukan pada rentang waktu 3 bulan dan dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu :

a) Tahap Persiapan

Tahapan ini mengkaji pustaka dan regulasi terkait pembangunan kantor kecamatan beserta penelitian awal tentang lokasi.

- Melaksanakan observasi awal guna mendapatkan gambaran awal mengenai keadaan kantor kecamatan eksisting
- Menyusun kajian literatur dan regulasi yang berhubungan dengan aspek-aspek pembangunan kantor kecamatan
- Menentukan acuan yang dijadikan sebagai pegangan dalam mencari data

b) Tahap Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian (Bungin, 2005). Sehingga perlunya tahap persiapan yang kuat literatur dan peraturannya.

- Melaksanakan observasi dengan cara langsung dan tidak langsung.
- Melakukan kompilasi data untuk selanjutnya diolah menggunakan metode statistic guna menyusun analisis.
- Menyusun data-data terkait scoring

c) Tahap Analisis, Pembahasan, dan Pemaknaan

- Membaca hasil pengolahan data untuk melakukan analisis dan pembahasan tentang aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian
- Menyusun hasil analisis tersebut sebagai suatu kajian penelitian

d) Tahap penarikan kesimpulan dan rekomendasi

- Penarikan kesimpulan sebagai hasil kajian pada analisis dan pembahasan

- Penyusunan rekomendasi yang didasarkan pada temuan hasil penelitian.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

a. Tahapan Persiapan

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan antara lain adalah (Joseph De Chiara dan John Hancock, 1989):

1. Pemerintahan harus dapat menyediakan tempat dan memudahkan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang efisien kepada masyarakat dalam hal ini adalah berhubungan dengan bagaimana menyediakan fasilitas pemerintahan yang tepat yang diperuntukkan bagi sebagian besar masyarakat yang dilayaninya untuk memanfaatkan fasilitas pemerintahan tersebut.
2. Dengan fungsinya sebagai 'public service' sudah seharusnya pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada semua masyarakat di kabupaten tersebut sebaik-baiknya dan secara tepat, sehingga aktivitas tersebut harus berada tidak jauh dengan jaringan jalan dan pusat pelayanan lainnya.
3. Bangunan pemerintahan harus berhubungan dan tidak terpisah sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
4. Lokasi pusat pemerintahan harus murah secara ekonomis dengan harga minimal (kepemilikan lahan harus diperhatikan).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penentuan lokasi (Vera Sari, 1997) antara lain adalah:

1. Faktor Tanah

kantor kecamatan yang dipindahkan menuju suatu lokasi baru, termasuk segala perlengkapan dan kegiatannya sebagai pusat pemerintahan kecamatan, diperlukan suatu areal yang cukup luas, tanah yang relatif mudah dan murah dibebaskan, serta sedapat mungkin tidak merusak lingkungan alam dan kegiatan penduduk yang telah ada.

2. Tersedianya Fasilitas Sosial

Faktor ini memperhitungkan 2 pemikiran:

- a. Pembuatan fasilitas baru sebagai sarana kehidupan penduduk yang akan dipindahkan relaif lebih besar biayanya dibandingkan dengan meningkatkan pelayanan fasilitas yang ada.
- b. Sebagai faktor pengikat penduduk pendatang, sebagai akibat dipindahkannya segala kegiatan pemerintahan kecamatan. Pada awal pemindahannya, fasilitas pelayanan yang primer ini benar-benar merupakan sesuatu yang amat dibutuhkan.

3. Faktor Sarana Angkutan Umum

Dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan maka peranan tersedianya sarana angkutan umum merupakan kebutuhan primer. Makin tinggi jumlah sarana angkutan makin tinggi mobilitas yang dapat dicapai.

4. Jaringan Jalan

Penilaian jaringan jalan ditekankan pada kemungkinan pembangunan jaringan jalan di masa yang akan datang. Makin besar jumlah/panjang jalan yang tersedia akan semakin menguntungkan. Pemanfaatan jaringan jalan yang telah ada akan semakin menguntungkan dari segi kemungkinan pembiayaan.

5. Kondisi Ekonomi

Dukungan fungsi ekonomi harus cukup kuat, hal ini dilihat dari:

- a) Nilai produk per kapita, dikaitkan dengan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan fungsi ekonomi kotanya di masa yang akan datang
- b) Nilai produk pertanian atau non pertanian, dikaitkan dengan sumber utama kegiatan penduduk dahn kemungkinan pengembangan kegiatan yang heterogen dimasa yang akan datang.

Unsur-unsur dasar dalam perencanaan fisik suatu kawasan yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan antara lain adalah (Djoko Sujarto; 62-71:1985):

- letak geografis
- keadaan topografis
- keadaan vegetasi
- keadaan hidrologi
- geologi dan kemampuan lahan
- sumber daya alam dan ketenagaan
- pola penggunaan tanah

Pemilihan lokasi bagi kawasan pusat pemerintahan agar dapat dimanfaatkan secara berdayaguna ditentukan berdasarkan faktor fisik dan sosial antara lain adalah (James Sturgis Pray; 1914) :

1. Faktor alamiah yang dipengaruhi oleh iklim dan topografi lokasi
2. Tersedianya fasilitas-fasilitas bagi penunjang perkembangan kawasan antara lain adalah fasilitas transportasi, fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi
3. Faktor kependudukan dalam hal ini dengan melihat pola guna lahan dimana masyarakat melakukan aktivitasnya seperti pemukiman penduduk, perdagangan, industri, pendidikan dan sebagainya.

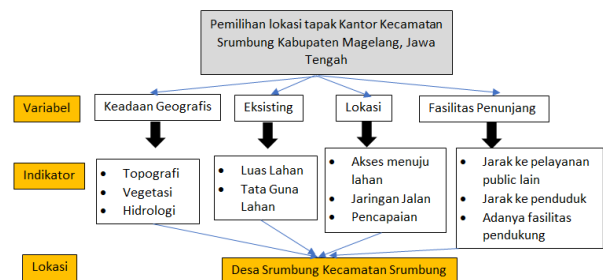
Berdasarkan tinjauan teori yang telah dibahas mengerucut pada variabel yang akan digunakan dalam menentukan penilaian tapak untuk lokasi bangunan kantor Kecamatan sebagai bangunan sederhana pemerintah dan pusat pemerintah skala kecamatan, maka mengerucut pada temuan faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi bangunan kecamatan yang dirangkum pada tabel berikut ini (lihat tabel 1):

Tabel 1. Tinjauan Teori yang digunakan untuk membangun variabel pertanyaan

Sumber Teori/Peraturan	Teori	Variabel
Joseph De Chiara & John Hancock, 1989	1. Pelayanan yang efisien kepada masyarakat berhubungan dengan penyediaan fasilitas pemerintahan yang tepat yang diperuntukkan	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi • Jaringan jalan

	bagi sebagian besar masyarakat 2. Dengan fungsinya sebagai 'public service', aktivitas harus berada tidak jauh dengan jaringan jalan dan pusat pelayanan lainnya. 3. Bangunan pemerintahan harus berhubungan dan tidak terpisah sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. 4. Lokasi pusat pemerintahan harus murah secara ekonomis dengan harga minimal (kepemilikan lahan harus diperhatikan).	<ul style="list-style-type: none"> • Konektivitas • Kepemilikan lahan
Vera Sari, 1997	1. Tersedianya Fasilitas Sosial a. Pembuatan fasilitas baru sebagai sarana kehidupan penduduk b. Sebagai faktor pengikat penduduk pendatang 2. Faktor Sarana Angkutan Umum Dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan maka peranan tersedianya sarana angkutan umum merupakan kebutuhan primer. 3. Jaringan Jalan Makin besar jumlah/panjang jalan yang tersedia akan semakin menguntungkan. 4. Kondisi Ekonomi Dukungan fungsi ekonomi harus cukup kuat, hal ini dilihat dari: a. Nilai produk per kapita, dikaitkan dengan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan fungsi ekonomi b. Nilai produk pertanian atau non pertanian, dikaitkan dengan sumber utama kegiatan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Sosial • Faktor Sarana Angkutan umum • Jaringan jalan • Kondisi ekonomi
Djoko Sujarto; 1985	Unsur-unsur dasar dalam perencanaan fisik suatu kawasan yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan: <ul style="list-style-type: none"> • letak geografis • keadaan topografis • keadaan vegetasi • keadaan hidrologi • geologi dan kemampuan lahan • sumber daya alam dan ketenagaan • pola penggunaan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • geografis • topografis • vegetasi • hidrologi • geologi • SDA SDM • Land Use
James Sturgis Pray; 1914	1. Faktor alamiah yang dipengaruhi oleh iklim dan topografi lokasi 2. Tersedianya fasilitas-fasilitas bagi penunjang perkembangan kawasan antara lain adalah fasilitas transportasi, fasilitas sosial & fasilitas ekonomi 3. Faktor kependudukan dalam hal ini dengan melihat pola guna lahan dimana masyarakat melakukan aktivitasnya seperti pemukiman penduduk, perdagangan, industri, pendidikan dan sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> • Iklim • Fasilitas Umum • Keragaman Aktivitas Penduduk

Kajian teori dan tabel tersebut dapat dirumuskan bahwa ada 4 variabel utama (Geografis, eksisting, lokasi, dan fasilitas) yang perlu dievaluasi dengan tiga indikator pada tiap variabelnya. Hal tersebut dapat divisualisasikan melalui gambar 1.



Gambar 1. Skema evaluasi tapak

b. Tahapan Pengumpulan data

Setelah melakukan survey lapangan ke Kantor Kecamatan Srumbung maka untuk dapat melakukan penilaian, langkah selanjutnya adalah dengan mengisi kolom penelitian sesuai dengan teori yang digunakan dengan keadaan eksisting. Adapun Kajian letak/lokasi eksisting kantor kecamatan Srumbung adalah sebagai berikut :

1. Keadaan geografis

• Topografi

Kondisi topografi di kantor kecamatan Srumbung saat ini cukup berkontur namun tetap relatif datar pada kawasan pusat pelayanan yang sederet dengan kantor kecamatan.

• Vegetasi

Kondisi vegetasi kantor kecamatan Srumbungsaat ini sudah cukup baik pada main entrance terdapat sekumpulan vegetasi yang menyambut kedatangan pengunjung dan berfungsi juga mereduksi karbon monoksida dari asap kendaraan bermotor yang berasal dari jalan utama dan juga kendaraan yang masuk kedalam halaman kantor Kecamatan. KDH 0,6 % sesuai dengan peraturan pemerintah yang dibebankan pada bangunan pemerintahan hal tersebut sehingga dari segi peraturan terkait KDH, Kecamatan Srumbung sudah memenuhi kriteria.

• Hidrologi

Hidrologi cukup baik karena berada di area yang tinggi. Air cukup jernih dan menggunakan sumur. Namun permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini adalah beberapa kali sempat terjadi kekeringan akibat musim kemarau panjang. Namun hal tersebut tertangani sejak November dimana curah hujan cukup tinggi untuk mendukung persediaan air tanah.

2. Eksisting

• Luas Lahan

Lahan seluas 1300 meter yang terdiri dari bangunan utama, halaman upacara, ruang pendukung pelayanan seperti pos pelayanan KB dan pemilihan Umum serta fasilitas lain seperti Mushola, rumah sementara Camat, dan juga ATM didekat main entrance (lihat gambar 1).

• Tata guna Lahan

Fungsi guna bangunan adalah sebagai area perkantoran. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah terkait zona penggunaan lahan Kecamatan Srumbung.

3. Lokasi

• Akses menuju Lahan

Akses menuju lokasi dapat secara langsung dari jalan utama/primer. Pintu masuk dan pintu keluar telah dibedakan. Namun area parkir masih belum dibedakan antara pengunjung dengan pegawai hal

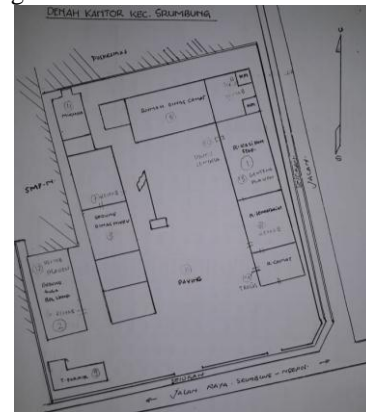
tersebut dapat menjadi pertimbangan desain halaman parkir agar alur kedatangan dan kepergian dapat lebih jelas dan rapi.

• Jaringan jalan

Terdapat jalan utama tepat didepan kantor kecamatan Srumbung. Disekitar Kantor Kecamatan juga terdapat jalan sekunder menuju permukiman warga sehingga jaringan jalan membentuk konfigurasi yang baik dan memudahkan pencapaian dari dank e dalam Kantor Kecamatan.

• Pencapaian

Pencapaian secara langsung dari jalan utama dengan kontur yang relatif rata



Gambar 2. Siteplan Kantor Kecamatan Srumbung

4. Fasilitas

• Jarak ke pelayanan publik lainnya

Jarak ke pelayanan publik lainnya antara 25 meter sampai 1 km dan mudah ditemukan (Hakim dan Cahyana, 2015). Keberadaan Kantor Kecamatan bersebelahan dengan Sekolah, Puskesmas, dan Kantor polisi sehingga memudahkan jangkauan antar fasilitas umum yang melayani kebutuhan masyarakat setempat.

• Jarak ke penduduk

Berada dekat dengan permukiman penduduk dan terdapat jalan sekunder yang menghubungkan sehingga akses dapat dijumpai disekitar kantor Kecamatan Srumbung

• Adanya fasilitas pendukung

Fasilitas pendukung ada dan cukup banyak seperti warung makan dan warung penyedia kebutuhan sehari-hari, atm yang dekat dengan lokasi tapak.

c. Tahap Analisis, Pembahasan, dan Pemaknaan

Jika dilihat dari data diatas maka lokasi kantor kecamatan sebenarnya telah memenuhi persyaratan. Meski beberapa aspek yang dirasa perlu ditambahkan sehingga tidak perlu memindahkan kantor kecamatan ke tapak yang baru namun hanya menambahkan fungsi

open space sebagai kebutuhan akan upacara, lahan parkir dan juga pengungsian sebagai konsep kantor kecamatan tanggap bencana (Nursa'ban, 2010). Adapun Tabel perhitungan pada penilaian tapak adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Perhitungan penilaian tapak

No	Indikator	Variabel	Score (1-5)
1	Keadaan geografis	Topografi	3
		Vegetasi	5
		Hidrologi	3
2	Eksisting	Luas Lahan	1
		Tata guna Lahan	5
3	Lokasi	Akses menuju Lahan	4
		Jaringan jalan	5
		Pencapaian	4
4	Fasilitas	Jarak ke pelayanan public lainnya	4
		Jarak ke penduduk	4
		Adanya fasilitas pendukung	4

Dari Nilai terbesar 5 dan terendah 1 didapatkan jumlah score maksimal 55, pada scoring yang dilakukan untuk lokasi eksisting kantor kecamatan Srumbung didapatkan score 42, sehingga sudah mencapai prosentase 87 %. Score ideal yang dibutuhkan adalah sebesar 80% minimal untuk kategori layak sehingga tapak kantor Kecamatan Srumbung sekarang dapat dikatakan layak hanya diperlukan penambahan sedikit pada poin luas lahan yaitu untuk aktivitas yang berhubungan dengan open space dan ketanggap bencana. Jika demikian maka prosentase 87 % dianggap sudah layak untuk dapat dikembangkan lebih lanjut tanpa harus memindahkan ke tapak yang baru. Dari indikator penilaian (scoring) maka 87% termasuk layak dan cukup ideal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang No.2 Tahun 2015 bangunan perkantoran dan pelayanan umum memiliki persyaratan KDB 60%. Dengan kebutuhan ruang minimal 1300m2 luas lahan Kantor Kecamatan Srumbung belum mampu memenuhi kebutuhan open space yang dimaksud. Maka dari itu sangat dibutuhkan pengembangan lokasi Kantor Kecamatan Srumbung dengan tapak tetap namun kebutuhan ruang menyesuaikan tuntutan kebutuhan aktivitas yang terjadi sekarang. Terdapat dua alasan yang mendasari ketetapan tapak lama yaitu karena tidak ada alternative tapak lain dan lokasi sudah sesuai dan cukup strategis dilihat dari penilaian sesuai dengan teori dan peraturan pemerintah yang digunakan.

Kekurangan yang digunakan sebagai acuan meredesain kantor Kecamatan yaitu adalah faktor Aksesibilitas (keluar masuknya kendaraan), pembagian parkir sepeda

motor dan mobil dan juga pembagian pengunjung dan pegawai, Kapasitas lapangan upacara, dan juga pembagian zona privat dan publik sehingga mempermudah alur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tanpa mengganggu konsentrasi pegawai yang melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain daripada hal tersebut, faktor utama sebagai konsep yang mendasari Kantor Kecamatan Srumbung yang baru adalah ketersediaan sarana ruang pertemuan yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana baik tempat pengungsian masyarakat dan tempat untuk meletakkan bahan logistik bantuan dari pemerintah maupun badan lain.

KESIMPULAN

Studi ini telah mencapai tujuannya, yaitu untuk mendapatkan tapak yang tepat untuk dipilih sebagai pengembangan kantor kecamatan Srumbung. Studi ini merupakan scoring pada tapak eksisting oleh pihak Kecamatan untuk kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masa kini dan konsep tanggap bencana mengingat keberadaan tapak kantor kecamatan Srumbung yang masuk pada area rawan bencana. Hasil studi ini menunjukkan tapak eksisting masuk kedalam kategori sangat layak di angka 87%.

Hal lain yang dapat disimpulkan adalah dari 4 variabel yaitu lokasi, keadaan geografis, eksisting dan fasilitas didapatkan variabel eksisting dengan indikator luas lahan merupakan penentu utama dari scoring pemilihan tapak untuk kantor kecamatan Srumbung, dibuktikan bahwa eksisting yang ada dapat mendukung pengembangan kebutuhan kantor kecamatan selanjutnya sehingga tidak diperlukan untuk berpindah lokasi tapak lain.

REKOMENDASI

Rekomendasi jika hasil studi ini digunakan untuk memilih tapak dan membangun kantor kecamatan Windusari adalah sebagai berikut :

- Tapak eksisting adalah tapak terpilih dengan skor pembobotan prosentase sebesar 87 %, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain adalah kebutuhan akan open space yang dimanfaatkan sebagai halaman parkir, upacara bendera, pertemuan rutin dan juga evakuasi bencana dan penyimpanan logistik bantuan. Selain daripada hal tersebut, kebutuhan akan toilet perlu ditambahkan mengingat fungsi bertambah sebagai darurat bencana yang banyak menampung masyarakat dan fleksibilitas ruang pertemuan juga perlu diperhatikan agar mudah dalam setting kegiatan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada semakin banyaknya kegiatan yang dapat ditampung di area kantor kecamatan tentunya kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

- Tapak yang ada sekarang terkait pintu masuk dan keluarnya membentuk siku yang terlalu lancip hal tersebut sering membuat sumber kemacetan ketika terdapat kendaraan roda empat masuk dan keluar secara bersamaan. Rekomendasi desain sirkulasi dapat diberikan dengan memindahkan pintu keluar pada jalan sisi barat kantor Kecamatan sehingga dapat mengurai titik-titik kemacetan.
- Konsep kantor Kecamatan yang tanggap bencana perlu digalakkan mengingat lokasi tapak berada pada area rawan bencana Gunung Merapi.
- Penataan taman perlu dilakukan agar dapat memberikan kesan asri dan juga dapat mengurangi polusi udara akibat kendaraan bermotor mengingat letak tapak berada di pinggir jalan utama.

DAFTAR REFERENSI

- Aslaksen (1997) Universal design: Planning and Design for All, Cornell University accessed at <http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/gladnetcollect>
- Bungin, Burhan(2005) Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Prenadamedia
- De Chiara, Joseph dan Hancock, John Hancock (2001) Time Saver Standar for BuildingTypes 4th edition,Mc Graw-Hill
- Dumanski, (1997), Criteria and Indicator for Land Quality Management. In ITC Journal. 1997-3/4.243-247
- Hakim, Maulana N, Cahyana, Rinda (2015) Pengembangan Sistem Informasi Geografis Untuk Memudahkan Pencarian Informasi Fasilitas Sosial Dan Lokasinya, Jurnal Algoritma Vol 12, No 1
- Harsritanto, Bangun IR (2018) Urban Environment Development based on Universal Design Principles, E3S Web of Conferences 31, 09010
- Harsritanto, Bangun IR (2018) Sustainable Streetscape Design Guideline based on Universal Design Principles, MATEC Web of Conferences 159, 01003
- Harsritanto, Bangun IR, et al (2017) Universal design characteristic on themed streets, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 99 012025
- Sari, Vera Revina (1997) Perencanaan Lokasi Bangunan Negara, IAP
- Sudibyakto. (1985). Mitigasi Bencana Alam Gunung Berapi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nursa'ban, Muhammad (2010) Identifikasi Kerentanan Dan Sebaran Longsor Lahan Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Jurnal Geografi Gea vol.10 no.2
- Sujarto, Djoko (1985) Beberapa Pengertian Tentang Perencanaan Fisik, Bhrata Karya Aksara
- Sujarto, Djoko (2001) Pilihan Strategis : Suatu Pengambilan Keputusan dalam PErencanaan Wilayah dan Kota, Bandung : Institut Teknologi Bandung
- Pray, James Sturgis (1914) The Survey for a City Plan, 5th annual conference of mayors and other city of Newyork